

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdyana I, d. (2023). *Studi Terorisme dan Kontra Terorisme*. Bai: Salmba Humanika.
- Anshar, S. A. (2011). *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaruan Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Arif, B. N. (Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana). 2002. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bakry, U. S. (2019). *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djelantik, S. (2010). *Terorisme: Psiko-politis, peran media, kemiskinan, dan keamanan nasional*. Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia.
- Ferry, A. N. (2022). *Efektiiitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*. Makassar: Perpustakaan Unhas.
- Hadiati, K. d. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Ismatu Ropi, d. (2016). *Peringatan Dini Terhadap Terorisme*. Jakarta: KENCANA.
- Kaligis, O. (2013). *HAM & Peradilan HAM*. Jakarta: Yasrif Watampone.

- Kukuh Adi Nugroho, d. (2023). Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan, Volume 7*. doi:DOI: 10.31316/jk.v7i1.4699
- Lamintang, P. (1988). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.
- Loqman, L. (1993). *Delik Politik di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: : Rineka Cipta.
- Mufid, A. S. (2013). *Peta Gerakan Radikal di Indonesia*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbanag Dan Diklat Kemenag.
- Muladi. (2004). *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, dalam Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana*. Jakarta.
- Nurbani, S. H. (2009). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Packer, H. L. (1968). *The Limits Of The Criminal Sanction*. California: : Satanford University Press.
- Priyanto, A. (2004). *Kebijakan LegislasTentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas: Kompas.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI.
- Rumbiak, Y. P. (2005). *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran hak Asasi Manusia dan Membangun Nasionalisme Di Daerah Krisis Integrasi*. Jakarta: Papua International Educcation.

- Rusianto, A. (2016). *Tindak pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. Kencana: Fajar Interpratama Mandiri.
- Satjipto Rahardjo. (2008). *Membedah Hukum Progresif*, . Jakarta: Kompas.
- Sinamo, N. (2011). *Penghantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2006). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarno, S. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Riau: DOTPLUS Publisher.
- Wirogioto, A. J. (2022). *Hukum Pidana*, . Malang: : CV. Literasi Nusantara Abadi.

B. Jurnal

- Diva Raya, d. (2024). Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx. *Public Sphare: Jurnal Sosial Poltik Pemerintahan dan Hukum, Volume 3*. doi:<https://DOI:10.59818/jps.v3i2.810>

- Djelantik, S. (2010). *Terorisme: Psiko-politis, peran media, kemiskinan, dan keamanan nasional*. Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia.
- Gunarto, M. P. (2009). Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan . *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum, Voume 21*. doi:<https://doi.org/10.22146/jmh.16248>
- Hafiz, S. M. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)) Papua Sebagai Kelompok Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Volume 7*. doi:<https://Doi.Org/10.35194/Jhmj.V7i1.1454>
- Hayat. (2013). Teori Konflik Dalam Perfektif Hukum Islam: Interkoneksi Islam Dan Sosial. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika, Volume 10*. doi:<http://dx.doi.org/10.24239/jsi.v10i2.31.269-292>
- Hidayat, S. F. (2021). Kewajiban Pemerintah Indoneisa terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiskha, Volume 9*. doi:<https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.39160>
- Hijriani. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Journal Sultra Research of Law, Volume 5*. doi:<https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>
- Hutahaean, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum to-ra: hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat, Volume 8*. doi:<https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.119>
- Kukuh Adi Nugroho, d. (2023). Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan, Volume 7*. doi:DOI: 10.31316/jk.v7i1.4699

- M. Wahid, d. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern. *Jurnal Al-Hikmah, Volume 3*. doi:<https://doi.org/10.30651/ah.v3i1.409>
- Muhammad Abdul Hadi, d. (2021). Klasifikasi Tingkat Ancaman Kriminalitas Bersenjata Menggunakan Metode You Only Look Once (YOLO). *Journal on Computer Hardware, Volume 2*. doi:<https://doi.org/10.25077/chipset.2.01.33-40.2021>
- Nendissa, J. E. (2022). Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4*. doi: <https://doi.org/10.23887/jpsu.v4i3>
- Pratyo, D. (2005). Sinergi TNI-Polri Dalam Deradikalisasi Terorisme di Indoensia. *Jurnal Keaamanan Nasional, Volume 2*, 35-36. doi:<http://dx.doi.org/10.31599/jkn.v2i1.37>,
- Pulo, P. (2024, September 30). *Tampang Anggota KKB Pembunuh 4 Pekerja Proyek Trans Papua Saat Ditangkap*. Retrieved from detikNews: <https://news.detik.com/>
- Rahardian, D. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik. *Law Reform, Volume 9*. doi:<https://Doi.Org/10.14710/Jati.%25v.%25i.1-9>
- RAS, R. A. (n.d.). Peranan Unit Jibom Krps Brimob Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Berupa Penggunaan BOM Dan Bahan Peledak. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Generalis, volume 4*. Retrieved from <https://jhlrg.rewanrencang.com/>
- Rastika, R. N. (2024, November 11). *Kapolri: Ada 24 Jaringan KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) di Papua , 1438 Anggota, dan Dilengkapi 361 Senjata Api*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com>

- Ridwantono, T. A. (2014). Teori Koflik Dalam Perspektif Politik Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum,, Volume 2*. doi:<https://doi.org/10.26905/idjch.v5i2.701>
- Salsabila Nadine Putri, d. (2022). Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB)) Di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia”. *Al - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3*. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/index>
- Suropati, L. M. (2020). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat. *Jurnal Lemnnas RI, Volume 7*. doi:<https://doi.org/10.55960/jlri.v7i1.52>
- Tukina. (2011). Tinjauan Kritis Sosial: Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hurmaniora, Volume 2*. doi:<https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.3090>
- Uni, T. E. (2021). Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)) Dalam Konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana. *Jurnal Rechtidee: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Volume 16*. doi:<https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11823>
- Wirawan, I. P. (2024). Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Organisasi Terorisme. *Court Review: jurnal Penelitian Hukum, Volume 4*. doi:<https://doi.org/10.69957/cr.v4i05.1732>

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI sebagai landasan dalam penetapan status KKB dan sebagai Penegak hukum yang berwenang dalam membantu menyelesaikan konflik di Papua

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagai landasan dalam penetapan status dan peran pemerintah dalam penanganan pertanggungjawaban pidana terhadap KKB

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan yang mengatur tindak pidana dan sanksi hukumnya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

D. Sumber Internet

detikcom. (2024, Desember 5). *KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) Papua Kian Brutal Bunuh Warga Sipil Hingga Pelajar Pun Jadi Korban*. Retrieved from detik.com: <https://www.detiksulses.com>

Indonesia, C. (2024, November 11). *Kapolri: Ada 124 Jaringan KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) di Papua, Punya 360 Senjata Api*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com>

Indonesia, C. (2021, April 29). *Pemerintah Resmi Tetapkan KKB Papua Teroris*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/>

- Indonesia, C. (2021, April 29). *Pemerintah Resmi Tetapkan KKB Papua Teroris*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429123128-12-636368/pemerintah-resmi-tetapkan-kkb-papua-teroris>
- Indonesia, C. (2024, April 10). *Polisi: KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) Bunuh Kepala Kampung di Pegunungan Bintang Papua*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com>
- Indonesia, C. (2024, Maret 25). *Video: Konferensi Pers TNI Terkait Penganiayaan Papua*. Retrieved from CNN Indonesia TV: <https://www.cnnindonesia.com/tv/20240325200300-407-1078876/video-konferensi-pers-tni-terkait-penganiayaan-warga-papua>
- Pulo, P. (2024, September 30). *Tampang Anggota KKB Pembunuh 4 Pekerja Proyek Trans Papua Saat Ditangkap*. Retrieved from detikNews: <https://news.detik.com>
- Rastika, R. N. (2024, November 11). *Kapolri: Ada 24 Jaringan KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) di Papua , 1438 Anggota, dan Dilengkapi 361 Senjata Api*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com>
- TV, C. I. (2024, Maret 25). *VIDEO: Konferensi Pers TNI Terkait Penganiayaan Warga Papua*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com>